

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, kompleksitas masalah sosial semakin meningkat, menjadi sumber kekhawatiran yang besar. Salah satu isu yang belum terselesaikan dan tetap menjadi tanggung jawab bersama adalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan masih menjadi isu nasional yang tak terabaikan dan tetap menjadi tantangan bagi pemerintah. Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang membutuhkan penanganan menyeluruh dari berbagai bidang pembangunan. Keberadaan kemiskinan memicu ketimpangan sosial di berbagai lapisan masyarakat, yang kemudian berdampak pada timbulnya masalah sosial lainnya. Menurut Akhmad (2021:176) salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah kurangnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang disebabkan oleh rendahnya mutu pendidikan yang dimiliki oleh individu tersebut.

Menurut Akhmad (2021:174) berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah individu yang mengalami kemiskinan di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang. Meskipun pemerintah telah meluncurkan sejumlah program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengatasi masalah kemiskinan. Menurut peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, PKH merupakan program bantuan sosial yang diberikan secara bersyarat, kepada keluarga atau individu yang berada dalam kondisi miskin dan rentan. Menurut Muttakin, dkk (2021:41) Tujuan utama PKH adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Mereka yang masuk dalam kategori ini terdaftar dalam basis data terpadu program penanganan fakir miskin yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Penerima manfaat PKH ditetapkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Selain pada pengurangan kemiskinan, PKH didesain khusus untuk memberikan akses lebih kepada ibu hamil, balita, lansia, dan individu dengan disabilitas agar mereka dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang ada. Bahkan,

anak-anak usia sekolah pun menerima manfaat dari layanan pendidikan yang diselenggarakan melalui PKH. Harapannya, dengan bantuan yang diberikan, setiap warga Indonesia seharusnya dapat memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan yang mereka butuhkan. Dalam praktiknya, anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam layanan kesehatan dan pendidikan yang disediakan di lingkungan mereka. Tugas mereka di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan untuk ibu hamil, pemberian nutrisi yang sesuai, imunisasi, serta pemantauan pertumbuhan balita dan anak prasekolah. Di sisi pendidikan, tanggung jawab mereka adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH di lembaga pendidikan sesuai dengan jenjang sekolah dasar dan menengah.

Pendamping PKH menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, namun kondisi lapangan yang sering tidak sesuai dengan rencana program dapat menjadi tantangan. Hal ini memerlukan pendamping untuk bertindak bijaksana dan sabar, bukan hanya sebagai koordinator tetapi juga pendengar bagi aspirasi masyarakat. Kompleksitas lapangan membutuhkan pendamping yang lebih dari sekedar pengelola program, tetapi juga sebagai mediator yang memahami kebutuhan riil masyarakat yang dilayaninya.

Menurut Noor (2022:34) Peran pendamping dalam menjalankan program di lapangan sangat penting karena mereka terlibat langsung dengan masyarakat. Mereka mengidentifikasi masalah yang ada, mendorong upaya penyelesaian, dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengembangkan diri. Untuk itu, pendamping perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman yang kokoh dalam memberdayakan masyarakat. Peran pendamping mencakup sosial, mediasi, negosiasi, dukungan, pembentukan konsensus, bantuan dalam kelompok, penggunaan sumber daya dan keterampilan, organisasi, dan komunikasi personal yang sangat penting. Peran edukasional mereka mencakup kegiatan untuk meningkatkan kesadaran, menyampaikan informasi, dan memberikan pelatihan.

Menurut Noor (2022:34) Sebelum melaksanakan tugasnya, pendamping PKH telah dibekali kemampuan dalam memberikan motivasi, fasilitasi, dan advokasi kepada penerima manfaat serta dalam melakukan identifikasi permasalahan dan

tindak lanjut penyelesaiannya. Namun pada praktiknya, mereka sering mengalami kesulitan di lapangan terutama jika belum memiliki pengalaman dalam bidang pemberdayaan. Kemampuan pendamping sangat menentukan keberhasilan program, termasuk program kesejahteraan sosial.

Salah satu tugas dan peran pendamping dalam PKH adalah dalam bidang pendidikan. Pentingnya pendidikan bagi KPM PKH adalah sebagai bekal dalam kehidupan komunitas. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama, penanaman nilai-nilai multikultural di komunitas KPM PKH adalah bagian penting dari kehidupan bersosial. Pendidikan menjadi sarana efektif dalam menyampaikan nilai-nilai multikultural kepada masyarakat, termasuk peran yang diemban oleh pendamping sosial dalam mendampingi KPM PKH di Desa Raksabaya.

Langkah strategis untuk mengubah pola pikir KPM PKH adalah kewajiban untuk mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Di sana, pendamping memberikan, mempelajari, dan mendiskusikan pendampingan aplikatif bagi keluarga KPM PKH terkait perilaku positif sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk membentuk keluarga mandiri dengan konsep diri yang mandiri dan sejahtera, yang pada akhirnya akan berkontribusi bagi Indonesia yang lebih baik.

Menurut Sartono, dkk (2023:30) peran pendamping memiliki dampak besar dalam menyiapkan dan mengembangkan SDM yang terampil, yang mampu bersaing secara sehat namun juga memiliki semangat kebersamaan yang tinggi. Ilmu pendidikan fokus pada praktik dan tindakan yang mempengaruhi perkembangan anak didik, yang tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan dengan kehidupan dan masa depan anak. Karena itu menjalankan pendidikan adalah tanggung jawab moral yang berat.

Menurut Rohmi, dkk (2023:170) dengan mendapat pendidikan yang baik, setiap individu memperoleh pengetahuan serta keterampilan yang membuka peluang mendapatkan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan pendapatan mereka. Ini sejalan dengan upaya membentuk individu melalui pendidikan, dengan fokus pada pengembangan kompetensi, karakter, dan visi yang

komprehensif guna mencapai tujuan serta menjadi aset manusia yang mendukung kemajuan bangsa.

Menurut (Mantri, 2019) dalam Rohmi, dkk (2023:170) pendidikan memiliki peran krusial dalam pengelolaan SDM, terutama pada tahap rekrutmen. Dalam tahap ini, pendidikan berperan sebagai penyedia sumber daya yang berkualitas. Dengan demikian, pendidikan dapat memutus siklus kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. SDM yang terdidik menjadi modal utama dalam pembangunan negara, khususnya dalam sektor ekonomi. Semakin banyak individu yang memiliki pendidikan yang baik, semakin mudah bagi suatu negara untuk mengembangkan bangsanya. Hal ini disebabkan oleh keberadaan SDM yang telah memiliki keterampilan, pengetahuan, serta akses teknologi yang dapat memudahkan pemerintah dalam mengelola pembangunan nasional.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Desa Raksabaya, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis. Ditemukan bahwa terdapat 215 orang yang merupakan KPM PKH dan penerima bantuan pendidikan sebanyak 87 orang, dengan mayoritas dalam usia produktif. Namun, terdapat permasalahan dalam hal pendidikan di kalangan usia produktif ini. Banyak ibu KPM PKH yang memiliki tingkat pendidikan rendah, sebagian besar hanya tamat SD dan SMP. Untuk tamatan SD sebanyak 49 KPM, sedangkan untuk tamatan SMP sebanyak 28 KPM. Kesadaran akan pentingnya pendidikan di antara KPM PKH tersebut masih kurang, tercermin dari partisipasi yang rendah dalam program pendidikan nonformal di desa, hanya melibatkan 8 orang warga. Hal ini menjadi perhatian serius yang memerlukan penyelesaian.

Alasan kurangnya kesadaran terhadap pendidikan di antara masyarakat KPM PKH adalah karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Pola pikir dan perilaku yang masih mengabaikan pendidikan menjadi faktor utama, meskipun sebenarnya pendidikan memiliki peran krusial terutama pada usia produktif. Pendidikan memiliki potensi besar untuk mengubah pola pikir dan perilaku KPM PKH. Selain itu, permasalahan terkait kondisi ekonomi dan faktor lain juga menjadi penyebab ketidaklanjutan pendidikan mereka. Mereka

cenderung terlalu bergantung pada bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Kendala akses terhadap pendidikan, seperti sekolah SMP dan SMA yang jaraknya sulit dijangkau. Selain itu anggapan bahwa sekolah non formal memerlukan biaya dan jarak yang jauh antara tempat tinggal dan sekolah non formal, juga turut berperan dalam hal ini.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut kemudian penulis tertarik untuk mengambil judul “Peran Pendamping PKH dalam Meningkatkan Layanan Pendidikan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditentukan permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Kurangnya pengetahuan anggota Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH Desa Raksabaya tentang pentingnya pendidikan
- 1.2.2 Masih adanya pola pikir dan perilaku KPM PKH di Desa Raksabaya yang masih menganggap pendidikan tidak penting untuk dilaksanakan
- 1.2.3 Kondisi ekonomi dan faktor-faktor lain menyebabkan tingginya tingkat putus sekolah di kalangan KPM PKH Desa Raksabaya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penelitian ini dirumuskan menjadi “Bagaimana peran pendamping PKH dalam meningkatkan layanan pendidikan di PKH Desa Raksabaya, Kabupaten Ciamis”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pendamping PKH dalam meningkatkan layanan pendidikan di Desa Raksabaya Kabupaten Ciamis.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Untuk menambah wawasan tentang kontribusi yang diberikan oleh pendamping PKH dalam meningkatkan kesadaran pendidikan di kalangan kelompok penerima manfaat (KPM). Hal ini dapat memperluas pengetahuan tentang pentingnya peran pendamping dalam program PKH.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat Desa Raksabaya, penelitian ini dapat dijadikan acuan juga referensi sejauh apa pengetahuan KPM PKH tentang kesadaran akan pentingnya pendidikan, sehingga angka partisipasi pendidikan non formal dapat meningkat melalui peran pendamping PKH di Desa Raksabaya.
- b. Bagi lembaga pendidikan masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam hal peningkatan kesadaran pendidikan melalui peran pendamping PKH.
- c. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi mengenai peran pendamping PKH untuk meningkatkan kesadaran pendidikan kelompok penerima manfaat (KPM) PKH.

1.6 Definisi Operasional

1.6.1 Pendamping PKH

Pendamping PKH adalah mitra pemerintah yang membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pendamping PKH berperan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, menggunakan pengetahuan mereka untuk membuka wawasan dan pengetahuan anggota keluarga penerima manfaat, serta membantu mereka meningkatkan kualitas hidup. Dengan bantuan pendamping, diharapkan KPM dapat keluar dari status penerima manfaat pkh dan meningkatkan kondisi mereka sehingga terbebas dari kemiskinan. Pendamping PKH memiliki peran krusial dalam membantu Sebagian Masyarakat miskin yang seringkali tidak memiliki kekuatan, suatau, atau kemampuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Seperti pendamping PKH yang ada di Desa Raksabaya sangat berperan dalam mendampingi para anggota KPM PKH untuk baik berperan sebagai fasilitasi,

advokasi, dan mediasi, Pendamping PKH di Desa Raksabaya setiap bulannya rutin melakukan pertemuan P2K2 kepada para anggota KPM PKH. Pendamping menjadi suara bagi mereka, membantu dalam memperoleh hak yang seharusnya mereka dapatkan.

1.6.2 Layanan Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu aspek penting yang menjadi prioritas dalam kehidupan manusia. Pendidikan menjamin terbukanya peluang bagi setiap individu untuk mencapai tujuan hidupnya. Dalam kehidupan berbangsa, pendidikan juga memiliki peran penting sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan negara. Secara sederhana layanan pendidikan dapat diartikan sebagai jasa pendidikan. Layanan pendidikan adalah upaya yang dirancang untuk mendukung dan memfasilitasi proses belajar mengajar serta pengembangan individu dalam konteks pendidikan formal dan nonformal. Layanan ini mencakup berbagai aspek yang saling berhubungan dan bersama-sama berkontribusi pada tercapainya tujuan pendidikan yang holistik. Layanan pendidikan tidak hanya fokus pada penyediaan fasilitas fisik, seperti gedung sekolah dan alat bantu belajar, tetapi juga pada pengembangan yang efektif, metode pengajaran yang inovatif, serta dukungan keuangan melalui beasiswa dan subsidi pendidikan. Selain itu, layanan ini meliputi bimbingan dan konseling untuk membantu siswa mengatasi masalah emosional dan sosial, serta memberikan panduan karir yang tepat.

1.6.3 Kelompok Penerima Manfaat

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kelompok penerima manfaat merujuk pada sasaran utama dari usaha-upaya pemberdayaan masyarakat, terutama dalam mengakomodasi kelompok yang berada dalam tingkat sosial ekonomi yang rendah. Mereka merupakan individu-individu yang secara langsung mendapat manfaat dari program pemberdayaan atau bantuan yang diberikan oleh lembaga pemerintah setempat maupun lembaga pusat. Tujuan utamanya adalah agar kelompok penerima manfaat ini mampu meningkatkan kemandirian dan daya upaya mereka. Di Desa Raksabaya sendiri ada sebanyak 215 para penerima manfaat, baik usia produktif maupun lansia, mereka memiliki tingkat sosial ekonomi yang rendah dan kurang berdaya sehingga menjadi anggota kelompok penerima manfaat PKH.